

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

1. Sejarah Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo yang ada saat ini dulunya merupakan dua daerah kekuasaan yaitu wilayah utara dan selatan. Utara adalah kesultanan dengan nama Kabupaten kulon Progo dan wilayah selatan adalah wilayah kekuasaan Pakualaman dengan nama Kabupaten Adikarta.

Sebelum perang Diponegoro (tahun 1825-1830) di daerah Naragung yang termasuk kedalam kabupaten Kulon Progo sebagai pejabat penguasa pemerintahan adalah Papatih Dalem. Pada masa sesudah tahun 1830 mulai dibentuk pemerintahan menjadi 4 kabupaten mini diantaranya 1) Tahun 1931 kabupaten Pengasih dan Sentolo, 2) tahun 1951 kabupaten Nanggulan, 3) tahun 1955 kabupaten Kalibawang. Pada tahun 1912 terjadi penggabungan 4 kabupaten yang dinamakan kabupaten Kulon Progo yang beribukota di Pengasih. Pada tanggal 16 Februari 1927 kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi dua distrik yaitu distrik Pengasih yang membawahi empat order distrik yaitu Pengasih, Lendah, Sentolo dan Sermo dan distrik Nanggulan yang membawahi empat order distrik juga yaitu Nanggulan, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

Pada tahun 1813, pengeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ariyo Pakualam I dan daerah pelenggah ditunjuk yang terbesar disebelah barat sungai Progo yang dikenal sebagai daerah Pasir Urut Sewu. Karena

daerah pelenggah letaknya berpencaran maka sentono dalem Pakualam Kyai Kawiredjo I menasehatkan supaya jadi satu daerah, setelah disetujui diberi nama Kabupaten Karangemuning dengan ibukota di Brosot dan ditunjuk Tumenggung Sosrodigdojo sebagai bupati ke I. Selang beberapa tahun pada masa Pakualam V memrintahkan kepada bupati ke II yaitu R. Riya Wasadirjo agar mengusahakan keringnya daerah rawa Karangemuning dan ternya menjadi daerah persawahan yang Adi (linuwih/ kelewat) dan Kerta (subur-makmur). Karena kondisi itu pada tahun 1877 Kabupaten Karangemuning diganti menjadi Kabupaten Adikarta yang beribukota di Bendungan, selanjutnya pada tahun 1903 pindah ke Wates.

Kabupaten Adikarta meliputi dua distrik yaitu distrik Sogan yang terdiri dari order distri Wates dan Temon, dan distrik Galur terdiri dari order distrik Panjatan dan Brosot . Wilayah inilah yang saat ini menjadi sorotan atau yang terkenal dengan sebutan Pakualaman Ground yang menjadi pokok permasalahan adanya tambang pasir besi. Kemudian setelah kemerdekaan RI pada tanggal 1 Mei 1951 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat bahwa ada penggabungan dua wilayah yaitu antara Kabupaten Kulon Progo (kesultanan) dengan Kabupaten Adikarta (Pakualaman) karena alasan ketidak berkenan nya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII kemudian yang diberi nama Kabupaten Kulon Progo dan beribukota di Wates dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 yang dikeluarkan pada 15 Oktober 1951 oleh pemerintah pusat yang sampai sekarang masih bertahan.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Kulon Progo merupakan satu dari lima kabupaten kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan terletak dibagian barat. Adapun batas-batas wilayah dari kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut²⁹ :

- a. Barat : kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa tengah.
- b. Timur : Kab. Sleman dan Bantul, Prov DIY.
- c. Utara : Kab. Magelang, Prov Jateng.
- d. Selatan : Samudra Hindia

Sementara itu kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0-1000 mdpl, dan terbagi menjadi tiga wilayah :

- a. Bagian utara : merupakan dataran tinggi / perbukitan menora dengan ketinggian antara 500-1000 mdpl yang meliputi kecamatan Girimulyo, Naggulan, Kalibawang dan Samigaluh, dijadikan sebagai kawasan konservasi dan daerah rawan bencana tanah longsor.
- b. Bagian tengah : merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 mdpl. Meliputi kecamatan Sentolo, Pengasih dan Kokap.
- c. Bagian selatan : merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 mdpl. Meliputi kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan Lendah. Merupakan kawasan rawan bencana banjir dan tsunami.

²⁹ BPS Kabupaten Kulon Progo 2008 hal 3 (versi pdf)

Batas- batas koordinat dari topografi kanupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut³⁰ :

- | | | | |
|------------|----------------------|-----|-----|
| a. Barat | : 110° Bujur timur | 1' | 37" |
| b. Timur | : 110° bujur timur | 16' | 26" |
| c. Utara | : 7° lintang selatan | 38' | 48" |
| d. Selatan | : 7° lintang selatan | 59' | 3" |

Luas wilayah kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, secara administrative terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Sementara penggunaan tanah di kabupaten Kulon Progo meliputi penggunaan tanah untuk persawahan sebesar 10.732,04 Ha (18,30%); tegalan 7.145,42 Ha (12,19%); kebun campur 31.131,81 Ha (53,20%); perkampungan seluas 3.337,73 Ha (5,69%); hutan 1.025 Ha (1,75%); perkebunan rakyat 486 Ha (0,80%); tanah tandus 1.225 Ha (2,09%); waduk 197 Ha (0,34%); tambak 50 Ha (0,09%); dan tanah-tanah lain seluas 3,315 Ha (5,65%) .

Bentuk morfologi didaerah bagian Selatan berupa dataran pantai, dataran rendah dan semakin ke Utara merupakan dataran bergelombang dan perbukitan. Daerah pegunungan berada diwilayah Utara dan Barat serta lereng Selatan dari rangkaian pegunungan yang bisa disebut dengan pegunungan Menoreh. Arah pengembangan wilayah kabupaten kulon progo seperti yang diatur dalam perda nomor 1 tahun 2003 tentang rencana tata ruang dan

³⁰ Ibid hal 3 versi pdf

pembinaan pengusaha menengah kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.

- vi. Meningkatkan peran sebagai pusat pertumbuhan daerah Barat dari provinsi DIY.
- b. Hirarki II terdiri dari kota Temon, Sentolo, Nanggulan, Brosot dan Dekso. Direncanakan sebagai pusat kegiatan tingkat II yang melayani wilayah yang bersangkutan dan wilayah sekitarnya, direncanakan melalui :
 - i. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
 - ii. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui upaya sector swadaya masyarakat maupun swasta.
 - iii. Pengembangan sector perekonomian dan sector perdagangan melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan pengusaha menengah kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.
 - iv. Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman).
 - v. Pengembangan dan pemntapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu

lintas dengan kota-kota hirarki I, II, dan III serta wilayah perbatasan.

- c. Hirarki III terdiri dari kota Lendah, Kokap, Panjatan, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Diarahkan sebagai pusat kegiatan local (wilayah kecamatan) yang melayani daerah sendiri. Direncanakan melalui :
 - i. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasaran perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
 - ii. Pemanfaatan lembaga pedesaan pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman).
 - iii. Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dengan kota-kota hirarki I,II dan III serta wilayah perbatasan³².

Kemudian pola pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari :

- a) Kawasan lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan manfaat utama lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kehidupan dan penghidupan. Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Kulon Progo dibagi dalam beberapa kelompok,

³² <http://www.kulonprogokab.go.id/v2/files/RPJM.pdf> diakses pada 03 Januari 2012 pukul : 22.300 WIB di Yogyakarta

meliputi : kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan atau ilmu pengetahuan, serta kawasan rawan bencana.

- b) Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan perekonomian penduduk. Kawasan budidaya secara garis besar dikelompokkan meliputi : kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pertambangan.
- c) Lokasi militer, merupakan lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebijakan pemanfaatan lokasi militer sepenuhnya pada instansi yang berwenang³³.

Jumlah penduduk kabupaten Kulon Progo menurut perhitungan cepat yang dilaksanakan oleh BPS kabupaten Kulon Progo tahun 2010 tercatat jumlah penduduk sebanyak 388.755 jiwa dari 3.452.390 seluruh penduduk Provinsi DIY yang terdiri dari 190.550 laki-laki dan 198.205 perempuan . Pada umumnya masyarakat Kulon Progo bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Tercatat sejak pada tahun 2004 ketahanan pangan selalu dapat dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi padi pada tahun 2004 sebesar 103.210.760 kg GKG atau setara beras 67.047.990 kg. hal ini

³³ <http://www.kulonprogokab.go.id/v2/files/RPJM.pdf> diakses pada 03 januari 2012 pukul : 22.300 WIB di Yogyakarta

dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat sekitar 37.624.000 kg sehingga menghasilkan surplus sebesar 29.423.840 kg . selain itu perdagangan juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Kulon Progo. Pada tahun 2005 terdapat 73 unit pasar yang meliputi 35 pasar milik pemerintah kabupaten dan 38 pasar desa.

Kondisi social ekonomi penduduk didaerah penelitian dapat ditelaah berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan ekonomi. Jika kita melihat dari tingkat pekerjaan, jenis utama yang pekerjaan kepala keluarga adalah sebagai petani atau di sector agraris, baik sebagai petani penilik, petani penggarap atau pun buruh tani. Kehidupan penduduk masih banyak didominasi oleh sector pertanian dan belum banyak dijumpai penduduk yang bekerja sebagai nelayan walaupun rumahnya dekat dengan laut.

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam membangun sebuah Negara. Di kabupaten kulon progo tingkat buta aksara mencapai 2,59%. Namun hal ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Sleman (1,00%) atau dengan kota Yogyakarta yang jumlah penyandang buta aksaranya hanya 0,16 % dan merupakan yang terendah di provinsi DIY disusul terendah kedua di kabupaten Bantul. Namun Kulon progo masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan kabupaten Gunung kidul yang jumlah penyandang buta aksanya mencapai 3,324% dan jumlah ini merupakan jumlah tertinggi yang diperoleh oleh BPS di provinsi DIY .

Secara teori penduduk buta aksara dapat terjadi karena lokasi penduduk yang sulit dijangkau sehingga akses pendidikan mejadi sangat sulit.

Pernyataan tersebut dapat dianggap benar jika kita melihat contoh pada kabupaten gunung kidul yang akses menjangkau wilayah nya termasuk sulit karena merupakan daerah pegunungan, namun hal itu tentu tidak demikian jika kita melihat ke kabupaten Kulon Progo. Data menunjukkan bahwa peringkat tiga besar persentase atau tingkat buta huruf di duduki oleh kecamatan Galur sebanyak 5,1%, wates 4,8%, dan sentolo 4,0%. Kita ketahui bahwa tiga kecamatan tersebut jika dilihat pada akses dan kondisi social ekonomi nya relative lebih baik dibandingkan dengan daerah pegunungan seperti Girimulyo dan Samigaluh.

Keadaan kependudukan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan mobilitas yang tinggi, hal ini terkait dengan struktur jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Komposisi penduduk dengan makin didominasi oleh kelompok usia produktif menunjukkan efektivitas penduduk yang tinggi.

B. Sejarah Pertanian Pesisir Kulon Progo

Tidak banyak yang mengetahui dipesisir Kulon Progo terdapat lahan subur yang biasanya hanya bisa kita lihat di kaki-kaki gunung. Pesisir Kulon Progo merupakan suatu wilayah kecil dari Provinsi DIY Yogyakarta yang menjadi salah satu pemasok kebutuhan hidup masyarakat Yogyakarta dalam hal hasil pertanian seperti cabai, padi, terong, semangka, melon, dll. Banyak yang merasa tidak percaya bahwa wilayah pesisir yang notabene nya adalah wilayah pasir gersang, panas dan sangat dekat dengan laut itu mampu

menghasilkan cabai yang berton-ton, semangka yang kaya air dan manis, serta padi yang sehat.

Namun hal itu terjadi di wilayah pesisir pantai selatan ini. Lalu banyak juga yang mempertanyakan bagaimana caranya tanaman dapat tumbuh di tempat yang hampir tidak mungkin ada air yang bersih (bukan air laut), lahan yang mempunyai tanah yang subur?. Masyarakat pesisir menjawabnya dengan membuktikan semua bisa dilakukan diatas pasir asalkan ada kemauan yang kuat. Sejarah pertanian pesisir Kulon Progo telah dimulai sejak Indonesia belum merdeka tepatnya pada tahun 1942. Ketika Jepang datang menjajah, warga tersebut dilarang menjadikan pasir sebagai lahan pertanian. Karena Jepang mencurigai warga penggarap sedang diam-diam membuat garam laut. Tapi ketika Indonesia memproklamkan sebagai Negara merdeka saat Jepang sudah tidak lagi berdiri diatas tanah pesisir, beberapa warga kembali bertahan makan dari pasir. Menurut salah satu warga pada tahun 1948 Soekarno pernah berkunjung melihat lahan pesisir, beliau mempersilahkan warga memanfaatkan lahan.

Kemudian setelah pernyataan tersebut berbondong-bondong masyarakat datang untuk menggarap lahan pesisir pantai yang tanahnya berisi pasir. Pada tahun 1970an terjadi bencana angin badai yang memporak-porandakan lahan pertanian tapi masyarakat tetap bertahan. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir di juluki sebagai orang cubung bermakna orang yang kampungan yang tertinggal inferior dan kondisinya yang penyakitan. Ini adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat lain. Sejarah nya pasir pantai

yang dibarengi dengan panasnya matahari dan kencangnya tiupan angin laut mengakibatkan warga mengalami penyakit kulit, pernafasan, perut dan mata.

Ada kebiasaan unik yang sering dilakukan oleh masyarakat cubung setiap malam, yaitu endong-endongan. Adat ini menjadi kebiasaan warga desa yaitu berkunjung ke rumah antar tetangga, berkumpul, bercerita pengalaman mereka satu sama lain. Menurut mbah Iman Rejo salah seorang warga desa Bugel hal ini adalah tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Momentum-momentum seperti inilah yang menjadi penggerak petani pesisir Kulon Progo untuk bertahan dan menggerakkan hidupnya. Endong-endongan ini bersifat pertemuan pertemanan, cenderung non hirarkis, spontan dan terbiasa setiap malam.

Pertemuan ini menciptakan kepercayaan individu satu sama lain di desa yang kondisinya kritis. Mereka mulai membicarakan masalah secara bersama-sama dan menemukan cara penyelesaian bersama. Berbagai gagasan pun lahir dari pertemuan tersebut kemudian menghasilkan gagasan untuk menyasati alam untuk bertahan hidup. Pada tahun 1984 kelompok warga bergotong royong mulai membuat sumur ladang sederhana. Karena tanah pasir mudah bergerak mereka membuat lubang yang sangat besar, sampai berdiameter 5 meter dan dengan kedalaman 5-8 meter, kemudian diberi srumbung yang dibuat dari bamboo. Teknologinya pun masih sangat sederhana hanya menggunakan kerekan yang terbuat dari bambu. Setelah itu dengan bergantian masyarakat mengolah nya dengan mencangkul, membuat bedengan, kemudian memberi pupuk kandang lalu menanam.

Instink ikut serta dalam memberikan pengaruh terhadap pengelolaan tanaman. Masyarakat ahli dalam mengamati sifat alam. Mulai dari menanam jagung, pohon akasia sampai penemuan sebatang cabai oleh seorang petani dan kemudian dipraktekkan. Dan akhirnya semakin banyak pengetahuan pertanian yang mereka temui sendiri tanpa pernah berguru pada siapapun. Hal ini juga menimbulkan reaksi terhadap perkembangan kelompok tani terbukti dengan mulai bermunculnya kelompok-kelompok tani. Sumur yang mereka buat secara sederhana mulai diperbaharui. Mulai dari disemen sampai dibeton, mulai dari menggunakan kerekan yang berlanjut kepada penggunaan pompa air yang disambungkan secara parallel dengan bambu ke bak-bak penampungan dari beton. Namun merasa masih kurang efektif bambu diganti dengan pipa paralon. Masyarakat memanfaatkan teknologi modern tapi dengan memahami karakter alam lahan pesisir pantai.

Pantai selalu identic dengan anginnya yang kencang, untuk menyiasati hal tersebut masyarakat membuat tanaman pemecah angina disekeliling petak lahan garapan, seperti tanaman jarak, sayur pari dan terong. Ada banyak hal pengalaman mereka menemukan pengetahuan yang penting dicatat, meski tidak harus disebutkan satu persatu. Pastinya para petani ini mengalami proses panjang yang sangat dinamis saat mempertahankan hidup yang sering terpuruk. Mereka pernah dilarang bertani, mereka dihantam angin setiap hari, mereka juga pernah dihantam badai, gumuk pasir mendominasi jadi lahan dengan kondisi sangat kritis dan rawan penyakit. Tapi dengan kebiasaan bertemu satu sama lain, berbagi, berdiskusi, dan menemukan strategi

menggerakkan hidup, mereka yang selalu terpuruk dengan cara bertahan dan berbagi kekuatan bersama setiap hari.

Petani pesisir sejak dulu selalu mengalami kesulitan, tetapi selalu saja mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan otonom, tanpa bantuan pihak luar apalagi pemerintah. Bahkan jalan menuju lahan pun yang dulunya sulit ditempuh, petani meratakan sendiri. Sejak dari hanya membuat membuat jalan sederhana yang ditanami batu-batu sampai akhirnya mereka aspal dengan tangan sendiri adalah hasil gotong royong dengan dana swadaya warga, tanpa bantuan pemerintah. Begitulah pengakuan semua petani pesisir ketika ditanyakan peran pemerintah. Petani pun tidak pernah mengalami konflik tanah garapan. Petani tahu mana yang menjadi hak garapnya satu sama lain dan tidak pernah mengalami konflik status tanah, karena petani yang mengatur sendiri. Kepercayaan mereka antar setiap orang dan komunitas kelompok tani melampaui kepercayaan relasi para pebisnis yang yakin setelah disucikan di atas kontrak hukum bermaterai. Saat ini lahan kritis itu sudah sangat subur dengan jerih 40 puluh tahun lebih. Tumbuhan apapun mungkin hidup di atas pasir pantai melalui tangan dan perawatan bersama hidup mereka.

Di atas pasir itu ragam tumbuhan hortikultura mampu ditanam sepanjang musim hujan maupun kemarau. Mulai dari cabe, terong, pari, jarak, kacang panjang, padi, jagung, semangka dan banyak lagi sayuran ada di lahan pesisir pantai bertanah pasir sepanjang 25 KM, melalui tangan petani telah menghidupkan bumi. Mereka menanam dengan pengetahuan kolektif, baik

melalui pengalaman mengenai teknologi modern dan juga keraifan lokal saat menentukan musim tanam, merawat hidup tumbuhan sampai memanen lahan. Secara umum tanaman yang jadi komoditas utama petani ini adalah cabe. Namun mereka juga menanam yang lainnya secara musim berkala.

Sampai hari ini setiap kelompok tani masih mendiskusikan kapan musim tanaman tertentu akan diawali dan dilanjutkan dengan tanaman lainnya. Setiap tahun para petani di masing-masing kelompok tani mendiskusikan musim tanam. Mereka berdebat berangkat dari berbagai perspektif, mulai dari kepercayaan terhadap sistem tanggalan jawa, keadaan alam baik tanah, laut dan langit, sampai kemungkinan bentrokan penumpukan panen dengan daerah lain. Berbagai pengetahuan dan menentukan hidup dari pasir tidak dilakukan sendiri, tapi berdasar diskusi setiap kelompok-kelompok tani yang mandiri satu sama lain. Melalui kelompok tani mandiri inilah banyak hal mulai ditentukan secara bersama-sama³⁴.

³⁴ <http://persma.com/baca/2011/06/29/kaum-tani-pesisir-pantai-selatan-jawa-dibawah-bayang-bayang-kapitalisme-pertambangan-oleh-muhammad-afandi.html> diakses pada 03 Januari 2012 pukul 24.00 WIB di Yogyakarta

Dalam peta tersebut menerangkan bahwa terdapat beberapa kawasan yang bukan merupakan tapak pertambangan, seperti batas social, jalan desa pemukiman, wilayah transmigrasi dan lain sebagainya, sedangkan tapak pertambangan (asiran kuning) pada peta tersebut dalam kenyataan yang penulis temui di lapangan merupakan daerah pertanian penduduk.

Secara umum wilayah yang akan dijadikan area pertambangan adalah wilayah pesisir pantai Kulon Progo. Menurut penelitian yang penulis temukan dilapangan pesisir pantai merupakan area pemukiman dan pertanian warga serta tranmigrasi, tidak kurang dari 21.322 jiwa³⁶ yang bertempat tinggal di pesisir. Pertambangan pasir besi yang dilaksanakan oleh PT Jogja Maargasa Iron ini meliputi 3 kecamatan dengan masing – masing luas tiap kecamatannya yaitu kecamatan Galur 3291,24 ha, Kecamatan Panjatan 4495,23 ha,dan Kecamatan Wates 3200,24 ha total luas ketiga kecamatan tersebut mencapai 10.950,71 ha³⁷ . Dengan begitu wilayah kontrak karya menghabiskan 27,3 % dari total luas tiga kecamatan tersebut.

³⁶ Bulletin Petani Berlawan SEKBER edisi 1 hal 3

³⁷ BPS kulon progo tahun 2008, hal 7.

D. Mega Proyek Penambangan Pasir Besi Oleh PT Jogja Margasa Iron

Ketertarikan perusahaan transnasional terhadap kandungan komoditas pasir besi di pesisir Kulon Progo berawal dari eksplorasi hasil penelitian Mackay & Schnellmann Pty .Ltd sebuah perusahaan konsultan geologi internasional pada tahun 2006 Yang melaporkan dalam lampiran kode JORC (The Joint Ore Reserves Committee Code)³⁸ , bahwa di pesisir Kulon Progo yang meliputi tiga kecamatan (Galur, Panjatan, Wates) terkandung potensi pasir besi 605 juta ton dengan kandungan besi (Fe) 10, 8% dari jumlah total tonase atau setara dengan 65 juta tone besi murni yang tersebar di luasan area 22 KM sepanjang pantai dan selebar 1,8 KM melebar ke daratan atau seluas 39,6 KM persegi. Hal ini di buktikan dengan adanya penggalian 902 titik penelitian hingga kedalaman 14,6 meter di area tersebut.

Dari hasil penelitian geologis tersebut juga merekomendasikan tentang kandungan pasir besi secara ekonomis yang dapat di eksploitasi oleh perusahaan tambang yaitu senilai dengan 305 juta ton pasir besi dengan kandungan besi murni mencapai 14,8% dari total tonase atau mencapai 39 juta ton besi murni dengan kedalaman eksploitasi galian hanya 6 meter dari permukaan. Jika kapasitas produksi mencapai 1 juta ton pertahun maka di seluruh wilayah seluas 39,6 KM persegi tersebut dapat di eksploitasi selama 30 tahun berjalan. Paparan inilah yang menjadi dasar kelayakan komersil

³⁸ Kode JORC adalah alat untuk membantu geologist untuk menyampaikan resiko yang dihadapi dalam proyek tambang kepada pembuat keputusan finansial yang tidak mengerti geologi. Jika perkiraan sumber daya berdasarkan data yang lemah atau tidak cukup maka resikonya tinggi. Data yang dapat dipercaya dan banyak akan menghasilkan resiko yang kecil dan perhitungan sumber daya yang akurat. (<http://geofisika-unmul.blogspot.com/2010/04/apa-itu-jorc-code.html> di akses pada 05 Januari 2011)

pertama pada perusahaan Indomines .ltd serta menjadi laporan perusahaan terhadap public tentang potensi komoditas pasir besi di kulon progo.

Sebelumnya, dari hasil eksplorasi penelitian tersebut telah menarik investasi dari perusahaan Australia Kimberly Diamond Limited (AKD.Ltd) sebagai cikal bakal perusahaan Indomines Limited (IDO.Ltd) melalui perubahan nama perusahaan. Perubahan nama ini juga merupakan satu momentum penegasan investasi Indomines sebagai perusahaan trans nasional terhadap investasinya di Indonesia semenjak tahun 2006.

Keberadaan PT. Indomines sebagai perusahaan asing dalam pengelolaan kuasa pertambangan dalam bentuk kontrak karya mengharuskan adanya penyesuaian hukum dalam investasi sesuai dengan undang – undang pokok pertambangan no 11 tahun 1967 tentang acuan kontrak karya, serta undang – undang penanaman modal asing no 25 tahun 2007³⁹ yang menjelaskan kedudukan perusahaan asing sebagai hukum formil yang berlaku di Republic Indonesia. Syarat sebagai perusahaan asing sebelum melakukan investasi harus membagi saham (bekerja sama) dengan perusahaan local. Dari sinilah kemudian terbangun aliansi perusahaan antara PT indomines dari Australia dengan PT Jogja Magasa Mining dari Indonesia yang melebur dalam satu bentuk perusahaan joint ventur dengan nama PT. Jogja Magasa Iron (PT.JMI)⁴⁰ .

³⁹ Kontrak karya antara pemerintah republic Indonesia dan PT JMI, 04 november tahun 2008

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Dzulfikar Selany (Wayang) aktivis gerakan petani Kulon Progo pada tanggal 25 Desember 2011 di Yogyakarta

Dalam hal ini PT. Jogja Magasa Iron terbangun dengan komposisi kepemilikan saham 70% oleh PT Indomines dari Australia dengan dan 30% dimiliki oleh PT. Jogja Magasa Mining⁴¹ . Keberadaan PT. JMI adalah sebagai operator eksploitasi pasir besi, produksi pig iron, serta pendistribusian hasil produksi dari dua perusahaan tersebut. Surat Australia Kimberly Diamond limited (AKD) kepada The Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited (ASx), Sydney, dengan Subject : Ironsands-Pig Iron Project-Yogyakarta, Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2005, menjadi bukti terjalinnya kesepakatan bisnis antara Australia Kimberly Diamond yang kemudian berubah nama menjadi Indomines.Ltd pada 2006, Krakatau Steel, dan PT. Jogja Magasa Mining (JMM) perusahaan pertambangan milik keluarga kerajaan yogyakarta hadiningrat hal ini berdasarkan akte pendirian PT JMM tertanggal 6 oktober 2005⁴².

Setelah persiapan untuk melakukan investasi di Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan local, sebagai PT.JMI mempersiapkan pengajuan kuasa penambangan kepada pemerintah republic Indonesia yang kemudian menghasilkan kontrak karya penambangan pasir besi terhadap lahan konsesnsi penambangan seluas 2987,79 ha, kontrak karya sebagai landasan legalitas yuridis formal yang mengacu pada undang-undang pokok pertambangan no 11 tahun 1967 di tandatangani oleh menteri ESDM selaku pemerintah republic Indonesia dan PT JMI selaku operator tambang pada

⁴¹ Kontrak karya antara pemerintah republic Indonesia dan PT JMI, Jakarta 04 november 2008

⁴² Koran Sinar Harapan 31 Maret 2011, *SG Dan PAG Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta*. George Junus Aditjondro

tanggal 04 november tahun 2008 yang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang, serta diterangkan sebagai saksi dalam artian mengetahui serta menyetujui dan menyatakan memberikan kontrak karya kepada PT. JMI adalah gubernur atas nama pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan bupati kulon progo atas nama pemerintah kabupaten kulon progo.

Setelah mendapatkan izin penambangan dalam bentuk kontrak karya PT JMI memasuki lima tahapan proses yang berlangsung semenjak tahun pertama (2008) hingga tahun ke tiga puluh (2038), kelima tahapan tersebut adalah :

1. Penyelidikan umum pada tahun pertama (november, 2008) dan kedua (November, 2010)*⁴³
2. Eksplorasi pada tahun pertama (November, 2008) hingga tahun ke empat (November, 2013)*⁴⁴
3. Studi kelayakan tahun pertama (November, 2008) dan tahun ke dua (November, 2010)*⁴⁵
4. Kontruksi tahun pertama (November, 2008) hingga tahun ke tiga (november, 2011)
5. Operasi tahun pertama (November, 2008) hingga tahun ke tiga puluh (November, 2038)

Dalam kontrak karya juga di sebutkan bahwa perusahaan dapat membangun fasilitas proyek sebagai penunjang yaitu berupa fasilitas

⁴³ Dapat di perpanjang berdasarkan persetujuan menteri, kontrak karya 2008.

⁴⁴ Ibid hal 26

⁴⁵ Ibid.hal 26

tambang, fasilitas pengolahan pasir besi, fasilitas peleburan, fasilitas pemurnian, fasilitas pelabuhan khusus, pendaratan pesawat terbang dan pengangkutan, komunikasi serta penyediaan air untuk keperluan pertambangan⁴⁶.

Sejauh pengamatan penulis memasuki tahun ke empat semenjak kontrak karya di tanda tangani, sebagai fakta dilapangan (wilayah kontrak karya) telah berdiri dua pilot project yang terletak di desa karang sewu pada sisi timur serta karangwuni pada sisi barat bersebelahan dengan keberadaan dermaga glagah yang sedang dalam tahapan pembangunan. Fungsi dari pilot project adalah sebuah wahana penelitian dan pelatihan untuk menentukan apakah nantinya akan diadakan penambangan pasir besi (exploitasi) atau tidak pada daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah⁴⁷. Namun semenjak berdirinya hingga sekarang tidak terdapat complain dari pemerintah terhadap fasilitas tersebut, sehingga mampu menjadi indikasi bahwa proyek tambang pasir besi akan melangkah pada tahapan eksploitasi sesegera mungkin setelah melengkapi seluruh persiapan administrasi yang melekat pada perjanjian kontrak karya pertambangan.

⁴⁶ Kontrak karya pertambangan pemerintah republic Indonesia dan PT JMI, periode operasi pasal 10 ayat 9.

⁴⁷ <http://www.scribd.com/doc/57289610/Lingkungan-Tambang-Pasir-Besi-Kulon-Progo-Yogyakarta>, keterangan dari budi handoko, penanggung jawab pilot project karangsewu, trisik.